

EKONOMI KESEHATAN (HEALTH ECONOMICS)

BANDI

Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN REGULASI

Minggu 11
Sesi 4

PENDHULUAN

- Kekuasaan Pengelolaan Keuangan negara (PKN) dipegang oleh **Presiden** dan harus dipertanggung jawabkan
- PKN **dikuasakan** kepada Menteri/ Ketua Lembaga, dan **diserahkan** kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota
- PKN harus dipertanggung jawabkan secara akuntabel dan transparan

PENDHULUAN

- PKN harus dilaksanakan dengan Perencanaan dan penganggaran (RENSTRA)
- Anggaran dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan instansi
- Pelaksanaan Anggaran dipertanggung jawabkan dan akan diperiksa oleh pihak eksternal (BPK)

PENDHULUAN: Pengertian Akuntabilitas

- Kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi
- Kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban dan keterangan daripihak yang bertanggung jawab atau pihak pihak yang berkewajiban lainnya

PENDHULUAN: Pengertian Akuntabilitas

Wikipedia.org: Akuntabilitas

- adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan yudikatif)
- yang mempunyai beberapa arti antara lain/ sinonim dengan:
 - yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility)
 - yang dapat dipertanyakan (answerability),
 - yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan
 - yang mempunyai ketidakbebasan (liability)

PENDHULUAN: Pengertian Akuntabilitas

Wikipedia.org: Akuntabilitas

- *Akuntabilitas* berasal dari [bahasa Latin](#): *accomptare* (mempertanggungjawabkan)
- bentuk kata dasar *computare* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan).
- kata itu sendiri tidak pernah digunakan dalam bahasa Inggris secara sempit tetapi dikaitkan dengan berbagai istilah dan ungkapan seperti
 - keterbukaan (*openness*),
 - transparansi (*transparency*),
 - aksesibilitas (*accessibility*), dan
 - Berhubungan kembali dengan publik (*reconnecting with the public*) dengan penggunaannya mulai abad ke-13

PENDHULUAN: Pengertian Akuntabilitas

Modul LAN

- Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya **mengelola sumber-sumber daya publik** untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program.

PENDHULUAN: Pengertian Akuntabilitas

Inpres no 7 tahun 1999

- Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
- untuk mempertanggungjawabkan **keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran**
- yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

PENDHULUAN: Pengertian Transparansi

Wikipedia.org: Transparansi

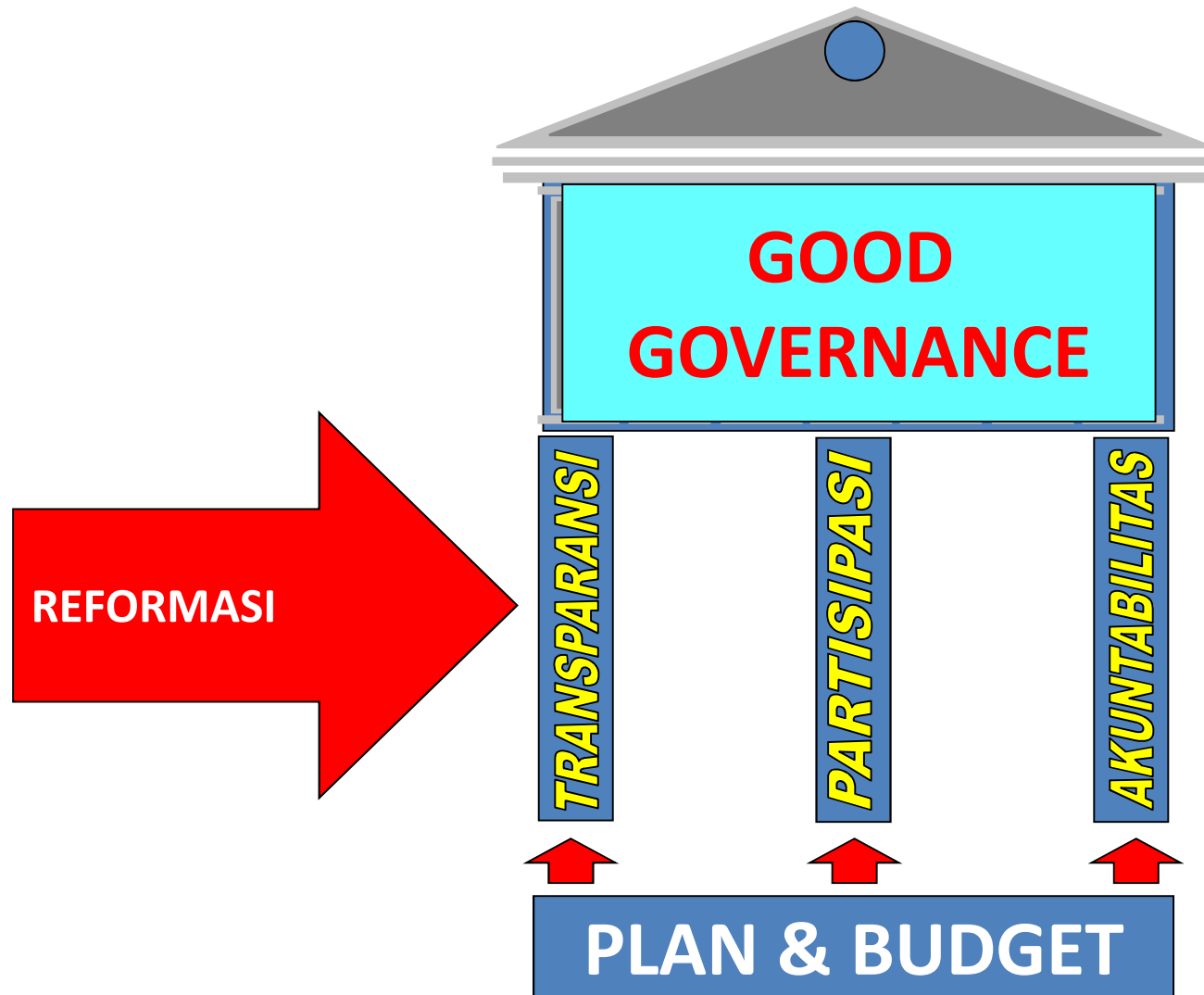
- **Transparansi** (seperti yang digunakan dalam istilah politik)) berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban.
 - Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu [Fisika](#): sebuah objek transparan adalah objek yang bisa dilihat tembus.
- Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat [pejabat pemerintah](#) bertanggung-jawab dan untuk memerangi [korupsi](#).
 - Bila rapat [pemerintah](#) dibuka kepada umum dan media massa,
 - bila [anggaran](#) dan [laporan keuangan](#) bisa diperiksa oleh siapa saja,
 - bila [undang-undang](#), [aturan](#), dan keputusan terbuka untuk didiskusikan,

PENDHULUAN: Pengertian Regulasi

Wikipedia.org: Regulasi

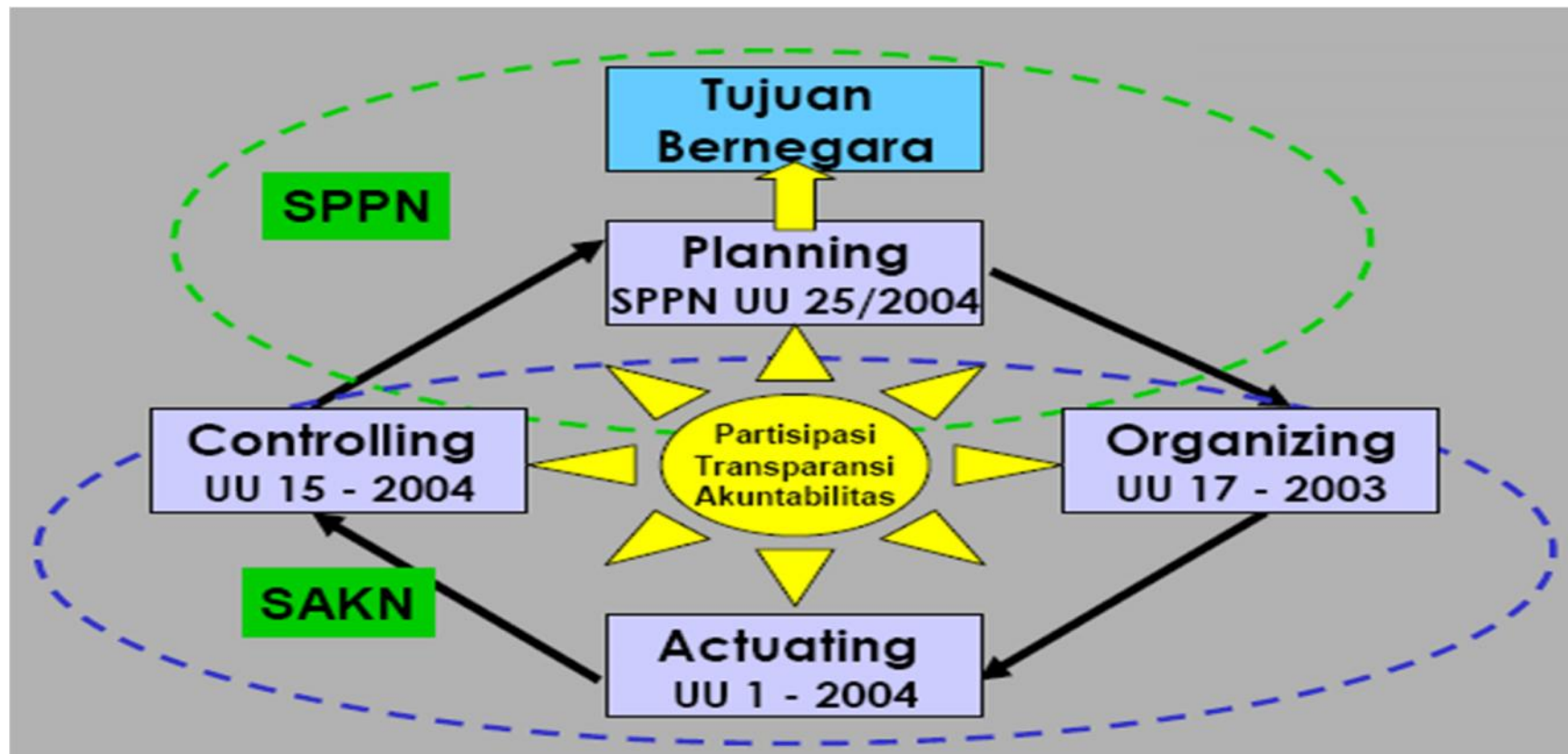
- adalah sebuah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks
 - sesuai dengan seperangkat aturan dan tren.
- di pemerintah:
 - biasanya peraturan khusus berarti sepotong legislasi yang didelegasikan dirancang oleh ahli subjek untuk menegakkan instrumen hukum (undang-undang dasar)
- dalam psikologi:
 - teori self-regulation adalah studi tentang bagaimana individu mengatur pikiran dan perilaku untuk mencapai tujuan mereka

Akuntabilitas & Transparansi



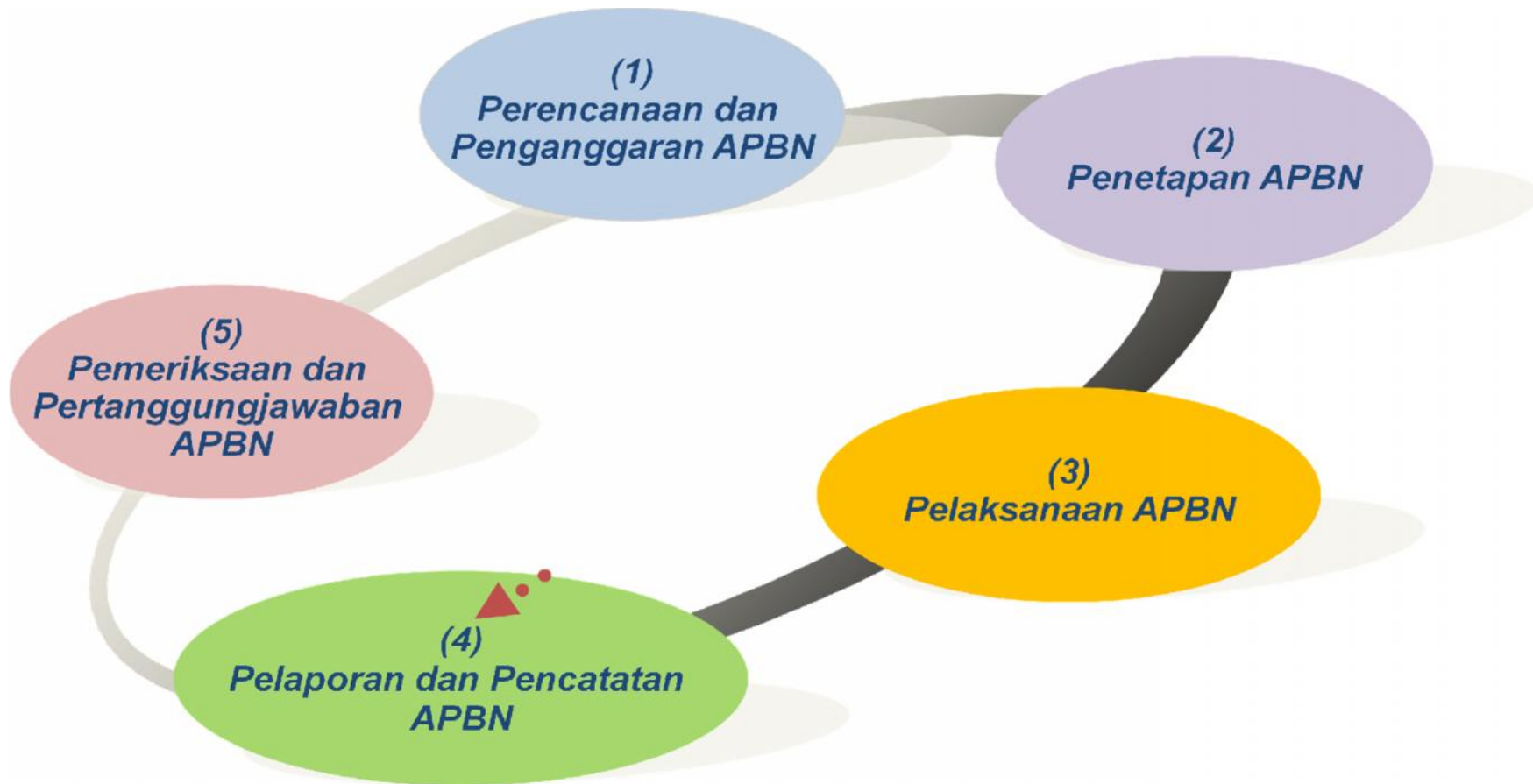
SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA-Siklus

- Sumber: Modul Diklat Pembentukan Auditor Terampil



SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN-Siklus

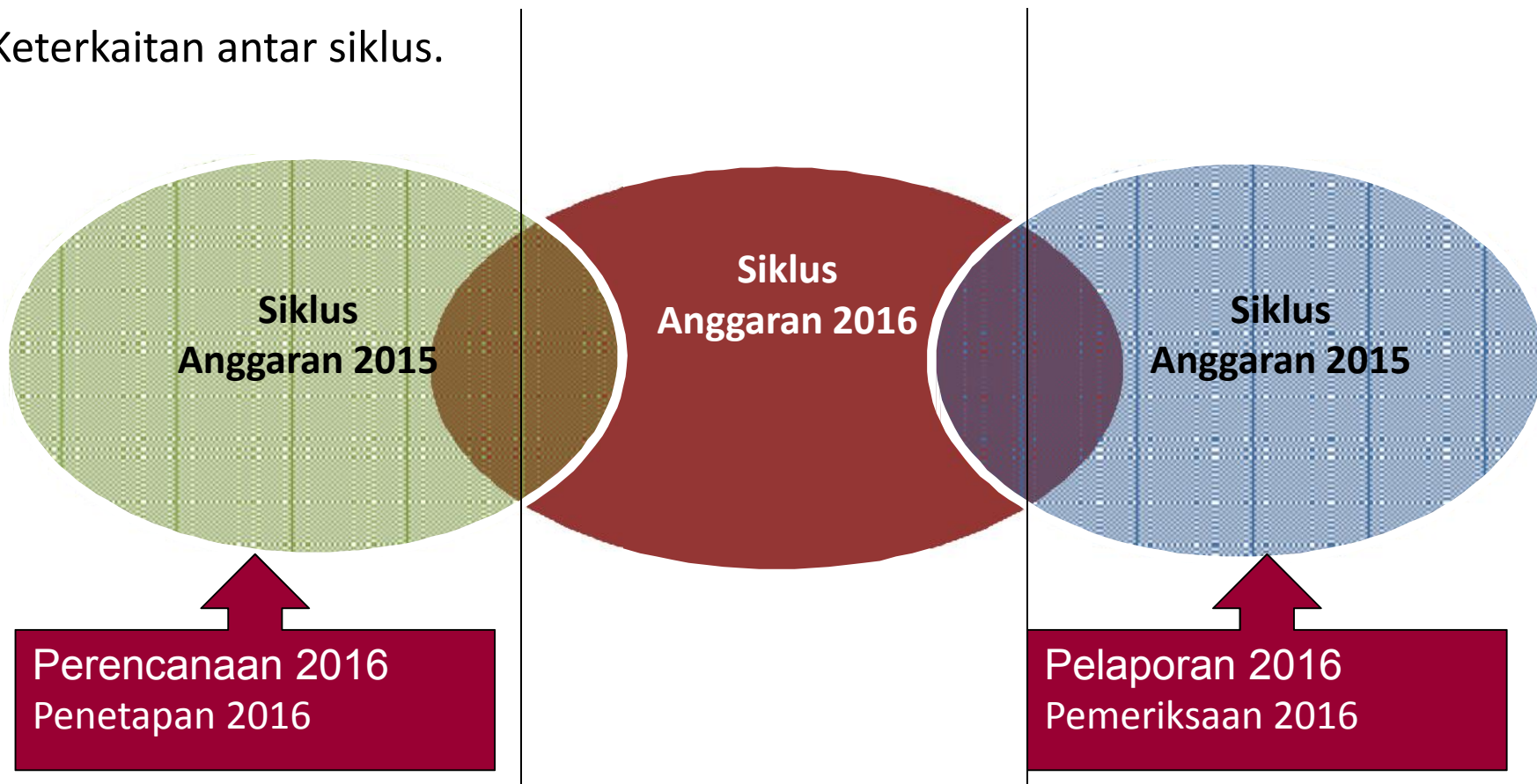
- Sumber: Dirjen Anggaran. 2013. Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia



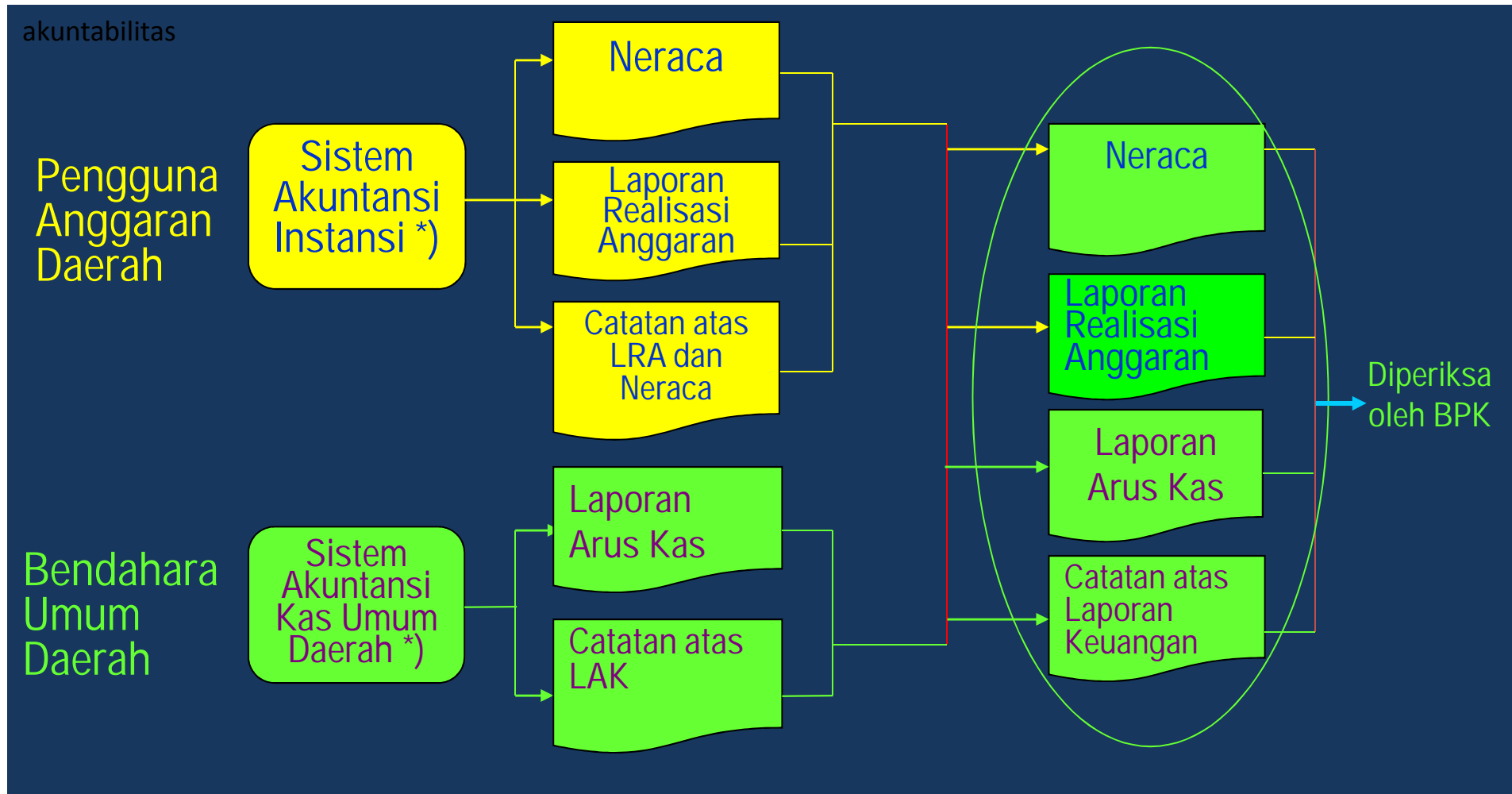
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN-Siklus

- Sumber: Dirjen Anggaran. 2013. Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia

Keterkaitan antar siklus.



SISTEM PELAPORAN: Akuntabilitas dan Transparan



Akuntabilitas Kinerja

1. Informasi capaian Indikator Kinerja Utama
2. Informasi realisasi pencapaian setiap sasaran yang direncanakan dan diperjanjikan (sumber RKT, Tapkin, dan PK) :
 - Pencapaian Indikator Sasaran dan Target Sasaran
 - Dampak dan manfaat pencapaian sasaran (perubahan yang terjadi)
 - Perbandingan realisasi : (target, realisasi tahun lalu, standar)
 - Program dan Kegiatan yang dominan terkait dengan pencapaian Sasaran

Akuntabilitas Kinerja

3. Permasalahan atau hambatan yang ditemui dalam mencapai sasaran.
4. Usulan strategi / solusi pemecahan masalah
5. Akuntabilitas Keuangan : penyediaan anggaran per kinerja (*reff. Form PK*)
6. Penyajian informasi kinerja
(*A picture worth a thousand words*)
(Beri ilustrasi berupa gambar, grafik, tabel, etc)

Sistem Akuntabilitas Kinerja

SISTEM AKIP (SAKIP)

- adalah **instrumen** pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu
- untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam **mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi**, serta misi organisasi.

(INSTRUMEN / SAKIP)

Sub Sistem pada sistem lama (Kep. Ka. LAN No.589/IX/6/Y/99)	Sub Sistem pada Sistem baru (Kep. Ka. LAN No. 239/IX/6/8/2003)	Keterangan
<p>1.Perencanaan Stratejik (Renstra)</p> <p>2.-----</p> <p>3.-----</p> <p>4.LAKIP</p>	<p>1.Perencanaan Stratejik (Renstra)</p> <p>2.Rencana Kerja Tahunan (RKT)</p> <p>3.Penetapan Kinerja (PK)*</p> <p>4.LAKIP</p>	<p>Formulir disempurnakan</p> <p>Sistem lama tidak ada</p> <p>Sistem lama tidak ada</p> <p>Formulir disempurnakan</p>

*) SE MENPAN No. SE/31/M.PAN/12/2004 tgl 13 Des 2004.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (INPRES NO 7/ 99)

- Adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

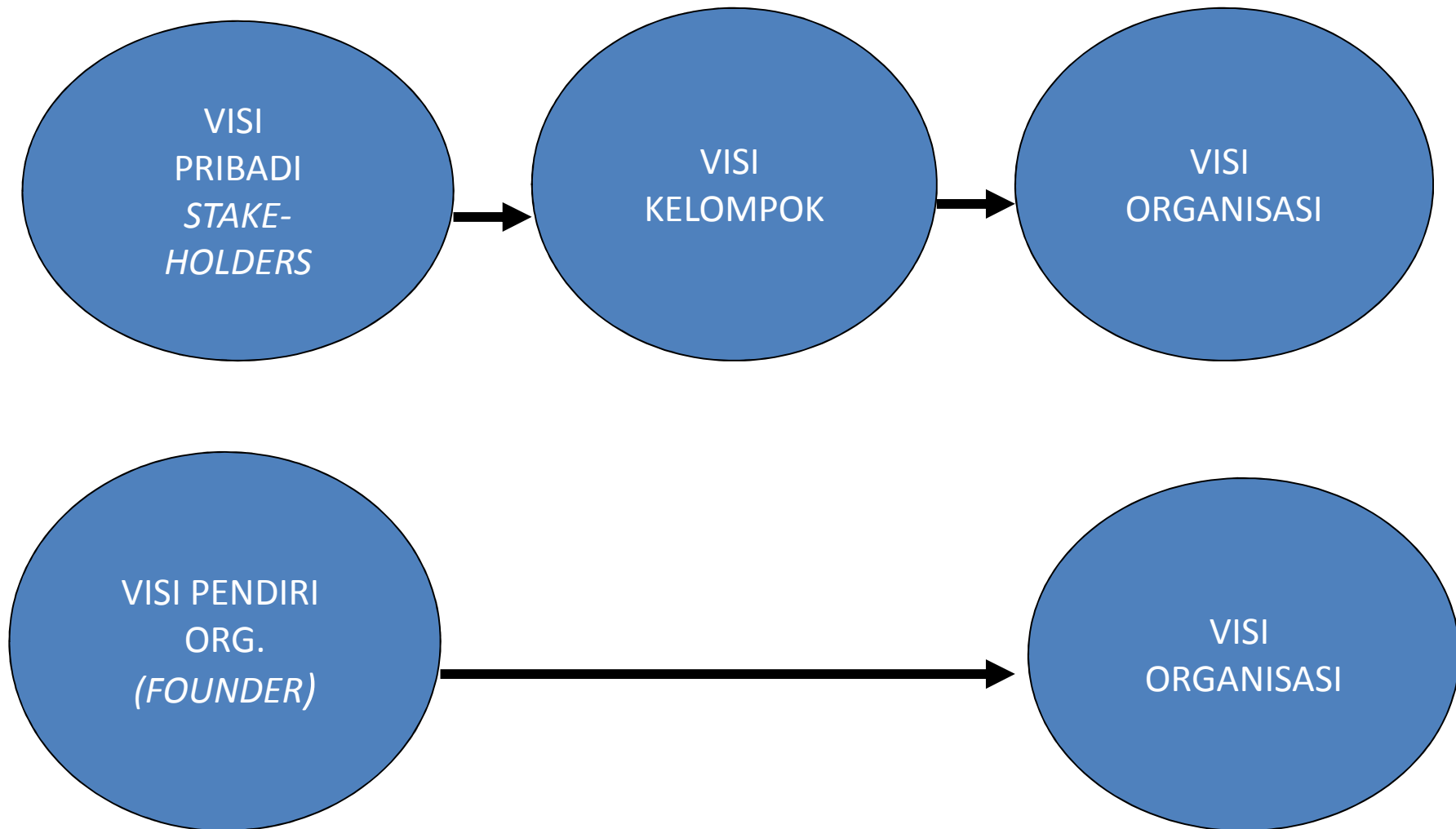
PERENCANAAN STRATEGIS

VISI (Inpres no 7 / 1999)

1. Cara Pandang jauh ke depan ke mana suatu instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.
2. Merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

PERENCANAAN STRATEGIS

Proses penyusunan visi



Visi Kementerian Keuangan

Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

MISI KEMENTERIAN

MISI

1. **Inpres no 7 tahun 1999**: Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
2. **Modul** : Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan

MISI KEMENTERIAN

MISI KEMENTERIAN KEUANGAN (4 misi)

1. Misi Fiskal
2. Misi Kekayaan Negara
3. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
4. Misi Penguatan Kembagaan

MISI INSTANSI PEMERINTAH

1. Misi Fiskal

- Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (prudent), dan Bertanggung Jawab

2. Misi Kekayaan Negara

- Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggung jawab

MISI INSTANSI PEMERINTAH

3. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global

MISI INSTANSI PEMERINTAH

4. Misi Penguatan kelembagaan

- i. Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- ii. Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab
- iii. Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya

TUJUAN INSTANSI PEMERINTAH

TUJUAN (Inpres 7/ 99)

1. Merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi
2. Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

TUJUAN, DISUSUN BERDASARKAN MISI DAN FKK

TUJUAN INSTANSI PEMERINTAH

ENAM TEMA TUJUAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN (RENSTRA 2010 – 2014)

1. Tujuan dalam Tema Pendapatan Negara:

Meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan dan keadilan masyarakat

TUJUAN INSTANSI PEMERINTAH

2. Tujuan dalam Tema Belanja Negara :

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas K/L dan pelaksanaan desentralisasi fiskal

3. Tujuan dalam tema Pembiayaan APBN

- Mewujudkan kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal

TUJUAN INSTANSI PEMERINTAH

4. Tujuan dalam Tema Perbendaharaan Negara

- Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan negara

5. Tujuan dalam Tema Kekayaan Negara

- Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan.

TUJUAN INSTANSI PEMERINTAH

6. Tujuan dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

- Membangun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

SASARAN INSTANSI PEMERINTAH

Sasaran (Inpres 7 / 99)

- adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan

.

SASARAN INSTANSI PEMERINTAH

SASARAN STRATEGIS KEMEN . KEU

1. Sasaran Strategis dalam tema pendapatan negara:
 - a. tingkat pendapatan yang optimal,
 - b. Tingkat kepercayaan stakeholders yg tinggi
 - c. Tingkat Kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai.
2. Sasaran strategis dalam tema belanja negara
3. Sasaran Strategis dalam tema pembiayaan APBN

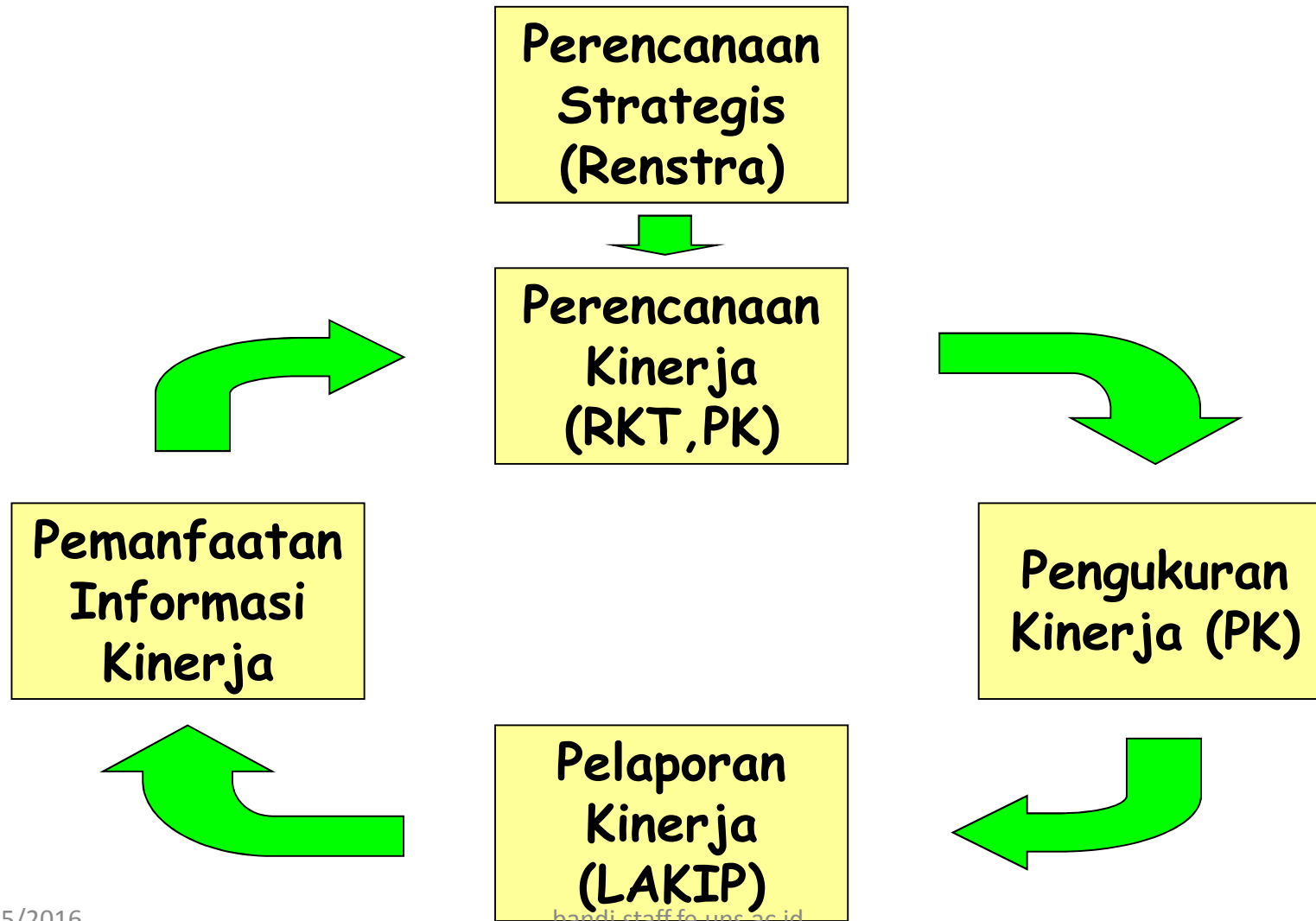
SASARAN INSTANSI PEMERINTAH

4. Sasaran strategis dalam tema perbendaharaan negara
5. Sasaran strategis dalam tema kekayaan negara
6. Sasaran strategis dalam tema pasar modal dan lembaga keuangan non bank
7. Sasaran strategis pembelajaran dan pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategi 6 tema pokok.

Orientasi Akuntabilitas Kinerja



SIKLUS SISTEM AKIP



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

Perencanaan Kinerja (Kep Ketua LAN 239/IX/6/8/2003):

- Merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
- Hasil dari proses tersebut adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

RKT

1. Sasaran : Uraian, Indikator, Target.
2. Program
3. Kegiatan: Uraian, Indikator kinerja (input, output, outcome, benefit, impact), satuan, target
4. Keterangan.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

Indikator Kinerja:

1. Merupakan **petunjuk** pencapaian tingkat kinerja.
2. Merupakan sarana monitoring dan evaluasi kinerja.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

Pengelompokkan indikator kinerja:

1. Indikator masukan / *input*, segala sesuatu yang digunakan dalam melaksanakan (proses) kegiatan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator proses / *process*, adalah berbagai aktivitas yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengelola masukan menjadi keluaran. Indikator proses tidak dipergunakan dalam sistem AKIP dan hanya dipergunakan pada saat evaluasi kinerja.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

3. Indikator keluaran / *output*, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh / dicapai dari suatu kegiatan.
4. Indikator hasil / *outcome* adalah hasil nyata yang diperoleh dari keluaran. Merupakan berfungsinya keluaran.
5. Indikator manfaat / *benefit adalah* manfaat keluaran bagi pemangku kepentingan
6. Indikator dampak / *impact* adalah pengaruh (negatif/positif) yang ditimbulkan oleh manfaat.

PERATURAN TERKAIT SAKIP

1. Inpres No. 7 Tahun 1999
2. SK Ka LAN No. 239 Tahun 2003
3. SE MenPAN No. 31 Tahun 2004
4. PermenPAN No. 9 Tahun 2007
5. PermenPAN No. 29 Tahun 2010

PERMENPAN NO. 29 TAHUN 2010

PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LATAR BELAKANG

- SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada;
- Terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan baru terkait dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
- Adanya kebutuhan untuk mengimplemen-tasikan Sistem AKIP dalam manajemen pemerintahan, bukan sekedar formalitas.

POKOK-POKOK PENGATURAN

- Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja

FORMULIR: RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

PENETAPAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA

--- Logo Lembaga ---

PENETAPAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

.....,
Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota

.....

PENETAPAN KINERJA ESELON I dan SATKER

--- Logo Lembaga ---

PENETAPAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan :
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

.....,
Pihak Pertama,

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA

Kementerian Negara/Lembaga : (a)
 Tahun Anggaran : (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran Tahun: Rp (c)

Tempat,, 20...

Menteri/ Pimpinan Lembaga

(.....)

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT ESELON I & SATKER

Unit Organisasi Eselon I : (a)
 Tahun Anggaran : (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Jumlah Anggaran :
 Program : Rp (c)

Jakarta,, 20 ...

Menteri /Pimpinan Lembaga,

Direktur Jenderal

(.....)

(.....)

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SELAIN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran Tahun: Rp(c)

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun: Rp: (d)

OUTLINE LAKIP

- Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)
- Bab I Pendahuluan
 - Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 - Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
- Bab IV Penutup
- Lampiran-lampiran

REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Dirjen Anggaran. 2013. Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia
- Maryanto. 2016. Bahan Tayang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Pengukuran Kinerja. Diklatpim Tingkat III. www.bppk.depkeu.go.id/.../akuntabilitas%20kinerja%20instansi%20pemerintah%20d. Diunduh Minggu, 15 Mei 2016, 18:05:52
- Teerawattananon, Yot . 2014. Lecture 1: Introduction to Health Economic Evaluation. yot@ihpp.thaigov.net atau [www.si.mahidol.ac.th/...](http://www.si.mahidol.ac.th/)
- _____. 2012. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. <https://su7as.files.wordpress.com/2012/08/pengantar-sakip-prior.ppt>. **Diunduh** Minggu, 15 Mei 2016, 18:05:52
- Wikipedia.org. 2016. Akuntabilitas. <http://www.id.wikipedia.org>. Minggu, 15 Mei 2016, 18:00:52.